MEDIA MASSA DAN TANTANGAN DISINTEGRASI BANGSA

A.S. ACHMAD *

ABSTRACT

Mass media and society have an affinity with one another. Therefore mutual-understanding is needed about position, function, and role played by each other within the national system. Arresting information pertaining to the public interest will be vain or ineffective. Whenever mass media are absent from supplying information demanded by large society, then informal mass communication will replace their role quickly. As one of the components of a total social system, mass media function to maintain system through two types of control, i.e. feedback control and distribution control. Concerning the danger of national disintegration, the media could offer a marvelous dedication if they spend much more of their freedom on replanting nationalistic values effectively to a large public.

Belakangan ini media massa kembali mendapat hujatan dari masyarakat bertalian dengan liputan-liputannya yang dianggap *kebablasan*, sehingga kian memperparah situasi bangsa yang sedang dilanda krisis disintegrasi. Berbagai macam tuduhan ditujukan kepadanya, mulai dari dipandang sebagai penyebar fitnah dan kebohongan, pencemar nama baik, pemutar-balik fakta, penghasut, tukang pembuat sensasi, manipulator kebenaran dan lain-lain, sampai kepada menyudutkan media sebagai kambing hitam dari suatu kejadian yang memprihatinkan. Dalam era keterbukaan ini, media sering menggunakan kebebasannya secara berlebihan, mereka juga tenggelam dalam euforia reformasi, sehingga lupa tanggung jawab sosial dan nasionalnya, demikian kesan yang terdengar di sana sini.

Entah sudah berapa banyak wartawan yang kena pukul, penanggung jawab redaksi diseret ke pengadilan, koran yang disomasi, bahkan ada pula yang kantornya diserbu dan diduduki dengan kekerasan oleh massa yang mengamuk karena merasa “diserang” oleh pemberitaan media bersangkutan. Pendek kata, media di mata sementara kalangan dilihat sebagai pembuat onar, penggemar konflik (dalam arti negatif), peniup pertentangan, dan suka mem-“blow-up” kejadian yang menambah runcing ketegangan sosial. Demikian kurang lebih secara umum reaksi negatif berbagai kelompok masyarakat terhadap sepak terjang dari sementara media massa kita.

Sebaliknya, di kalangan praktisi media ada anggapan atau terdapat kesadaran bahwa munculnya tuduhan-tuduhan itu pada umumnya adalah sebagai akibat logis dari pelaksanaan tuntutan tugas profesinya. Fungsi media menghendaki peliputan dan penyebaran berita seluas mungkin sesuai dengan ciri universalitasnya dan melakukan kontrol sosial terutama kepada lembaga-lembaga politik-

* Guru Besar Ilmu Komunikasi, dan Ketua Progran Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin

pemerintahan, ekonomi dan sosial yang banyak melakukan kegiatan atau tindakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di samping itu juga adalah kewajiban media untuk selalu memantau dengan cermat dan mengkritisi tindak tanduk tokoh-tokoh publik, pemimpin-pemimpin panutan bangsa, pada sosok mana rakyat banyak tergantung. Mereka tak gentar atau surut menghadapi tuduhan atau ancaman dan semua itu diterima dengan lapang dada karena merasa telah menunaikan tugas jurnalistiknya. Tantangan itu bahkan diterima sebagai motivasi untuk terus melaksanakan missinya terutama dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela di tubuh bangsa, menurut caranya sendiri. Tudingan-tudingan itu cukup diterima sebagai reaksi dari mereka terutama yang merasa kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh liputan media. Begitulah kira-kira secara umum pula tanggapan sementara kalangan pelaku media terhadap berbagai sorotan masyarakat tersebut.

Kalau demikian halnya maka apa pula yang mendorong lahirnya badan-badan pelaksana kontrol sosial yang lain dalam masyarakat, seperti ICW (Indonesian Corruption Watch) dan GOWA (Government Watch) ? Apakah “watch-dog” media massa kurang galak serangannya, atau kurang gesit dan kurang tajam penciumannya ? Lalu mengapa pula harus lahir lembaga Media Watch dalam masyarakat kita ? Tidakkah semua gejala ini menunjukkan bahwa media massa kita memang harus mawas diri dan perlu melakukan koreksi diri.

Tanggapan kedua pihak, masyarakat dan media massa tersebut, bukan salah dan bukan pula benar apalagi dipertentangkan. Persoalan ini perlu dilihat secara makro. Masyarakat dan media yang memiliki daya tarik-menarik satu dengan yang lain memang memerlukan saling pemahaman terhadap posisi, fungsi, tugas dan peran masing-masing dalam kehidupan bangsa. Mereka juga harus tahu batas-batas tugas kewajiban dan tanggung jawab profesi masing-masing serta memahami benar apa yang masing-masing harus lakukan dan harus tidak

lakukan. Dengan menyadari diri masing-masing sebagai bahagian-bahagian dari tubuh bangsa, atau sebagai komponen-komponen dari suatu keseluruhan sistem sosial nasional yang besar, media dan masyarakat tentunya diharapkan dapat bekerjasama secara harmonis, bantu membantu demi terlaksananya fungsi masing-masing sebagaimana mestinya dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama dari bangsa kita.

Guna lebih memahami bagaimana sebenarnya peran media dalam masyarakat, baik kita menengok sejenak kepada bagaimana fungsi komunikasi massa dalam kehidupan bersama.

Sebagaimana kita maksudkan di sini, *komunikasi massa* adalah suatu konsep komunikasi yang diartikan sebagai: *tiap pernyataan yang pesan-pesannya terbuka bagi setiap orang*. Jadi komunikasi massa menawarkan informasinya kepada siapa saja; tidak seorang pun yang dibatasi oleh sumber komunikasi ini untuk mendapatkannya (Stappers, 1983).

Keterbukaan informasi komunikasi massa itu, dilihat dalam kerangka makro, sesuai dengan fungsinya di dalam kehidupan bersama. Semua pengkaji komunikasi sependapat, bahwa fungsi primer komunikasi massa adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Ia terlibat dan bekerjanya ditentukan oleh proses input – output dalam mekanisme sistem sosial. Lebih-lebih dalam masyarakat demokratis, ia melayani kebutuhan sistem itu, memberi masukan berupa informasi kepada lain-lain subsistem agar sistem sebagai keseluruhan tidak kocak atau tidak pincang jalannya. Sebab itu informasi komunikasi massa adalah bersifat selektif, tidak asal informasi tetapi tertentu pula kualitasnya, mutunya dan ukurannya. Dalam jurnalistik misalnya, hal ini antara lain dapat dikenal pada apa yang disebut dengan: kepatutan sebagai berita (*newsworthiness*).

Guna melaksanakan fungsi itu, komunikasi massa menyampaikan informasinya melalui berbagai saluran. Saluran-saluran ini

selain media massa modern seperti surat kabar, televisi, radio, dan film yang sudah lama kita akrabi, juga saluran ultra-modern media interaktif seperti internet di samping saluran-saluran lain termasuk media tradisional dan saluran antar-persona (transceiver channel). Dalam dimensi komunikasi massa, media massa modern, ultra-modern maupun tradisional, sama sekali tak dapat dipisahkan dari saluran antar-persona. Jaringan media massa berkaitan erat dengan jaringan sosial (Lin, 1973), atau seperti istilah Shibusaki (1966): saluran “institusional” bertalian dengan saluran “pembantu”. Bahkan di dalam mengamati interaksi ini, Brouwer (1967) menilai komunikasi massa informal (saluran antar-persona) lebih penting perannya dari pada komunikasi massa formal (media massa). Komunikasi massa informal berlangsung dalam percakapan-percakapan di antara orang-orang, dan kontak-kontak semacam itu lebih fundamental dalam struktur komunikasi massa dari pada “yang tampak di permukaan” yaitu media massa (studi komprehensif dan mendalam tentang komunikasi massa formal dan informal ini dapat dilihat antara lain Lerg, 1970 dan Evers, 1999).

Di dalam model mycelium-nya yang terkenal, Brouwer (1968) mempersamakan media massa dengan jamur yang tampak di atas tanah dan paling banyak menarik perhatian orang. Sedangkan bagian terpenting dari mana kelompok jamur ini tumbuh dan muncul di permukaan terdiri dari mycelia, yaitu jaringan kompleks benang-benang halus di bawah tanah yang tidak kelihatan. Mycelia ini diumpamakan percakapan-percakapan publik dan sering mengicuh orang karena dianggap gejala sekunder atau dependen. Maka kalau ahli-ahli botani sepakat bahwa yang terpokok adalah mycelia dan bukan jamur, di dalam struktur komunikasi massa yang terpenting bukan media massa melainkan komunikasi massa informal, konversasi-konversasi persona di dalam masyarakat luas.

Sebab itu manakala satu ketika media massa tidak dapat memenuhi *permintaan*

informasi dari publik khalayaknya, maka komunikasi informal segera tampil menggantikannya membawa informasi yang khalayak butuhkan. Keadaan seperti ini dapat terjadi dalam suatu sistem sosial di mana media massa kurang mendapat kebebasan yang seharusnya guna bisa berfungsi, atau di mana salah satu subsistem atau komponen sistem melakukan kontrol informasi yang berlebihan dan terlalu membendung kontrol subsistem yang lain sehingga keseimbangan sistem menjadi terganggu. Hal yang sama telah kita alami di masa orde baru di mana kebebasan media sangat dikekang oleh rezim orba sehingga berita-beritanya cenderung menjadi monoton, gersang, miskin nilai informasi. Informasinya tidak lagi mengutamakan kebutuhan publik yang luas, melainkan yang diharuskan dimamah oleh rezim penguasa.

Sebetulnya bilamana media massa kurang atau tidak lagi menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi primernya, maka sebagai subsistem dari sistem sosial di mana ia terlibat juga sudah mengalami disfungsi, walaupun memiliki keunggulan hardware (McQuail, 1992). Akibat pengetatan kontrol yang amat sangat oleh pemerintah sebagai salah satu komponen sistem kepada media massa sebagai komponen yang lain dari sistem yang sama, lambat laun merusak totalitas sistem orde baru yang akhirnya hancur berantakan. Begitu pula sebaliknya, kontrol yang berkekurangan dari yang seharusnya diberikan oleh dan di antara komponen-komponen sistem itu bisa menimbulkan anarki informasi yang juga merusak keseimbangan sistem.

Karena itu jumlah tiras surat kabar misalnya bukan satu-satunya indikator atau ukuran berpengaruh atau tidaknya penerbitan itu dalam masyarakat. Media yang tidak atau kurang berfungsi sebaliknya dapat menciptakan “informatieve douche”, dan karena isi maupun corak informasinya adalah itu-itu juga, secara kumulatif akhirnya bisa membuat khalayaknya terancam kelelahan mental.

Di zaman orde baru itu sering terjadi suatu peristiwa yang penting bagi khalayak ramai tidak diekspos oleh media massa. Namun akhirnya kejadian itu diketahui juga oleh publik melalui komunikasi massa informal tersebut. Komunikasi informal ini sewaktu-waktu mengoreksi bekerjanya media massa. Jaringan-jaringannya acapkali terbentuk di sekitar persahabatan pribadi yang merupakan titik-titik sasaran perhubungan manusiawi. Tempat-tempat bekerja, warung-warung kopi, rumah ibadah, tempat cukur, pesta-pesta perjamuan dan lain-lain tempat pertemuan persona menjadi konteks di dalam mana pertukaran informasi yang penting terjadi. Peranan-peranan yang dimainkan di dalam saluran informal ini tidak ditentukan di dalam kebiasaan maupun di dalam hukum. Sumber-sumber ini hanya dinilai secara luas di dalam batas-batas reputasi pribadi para partisipan dari segi kejujurannya, pengetahuannya, luas pandangannya, dan *koneksi-koneksinya*. Walaupun aransmen-aransmen itu adalah informal, partisipan-partisipan dapat dikenal karena kebanyakan mereka tahu satu sama lain atas dasar pribadi.

Sebenarnya tidak mengherankan kalau di zaman orba yang lalu sering sekali masyarakat dilanda desas-desus. Media massa yang tertekan, kehilangan otonomi dan kebebasannya, tidak banyak bisa berbuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shibutani, bahwa bilamana *demand* informasi dari publik melebihi *supply* yang mampu diberikan oleh media massa, maka konstruksi desas-desus cenderung terjadi. Juga halnya tidak jauh berbeda dengan informasi yang dimanipulasi, apalagi mendeponirnya, tidak akan bertahan lama, karena persoalan publik sukar ditutup. Sifat atau hakekat persoalan itu sendiri menuntut demikian, yaitu secepatnya dibuka. Makin besar – penting – luas dan mendesak makna peristiwa / persoalan itu bagi publik, semakin tinggi probabilitasnya segera menjadi pembicaraan umum. Dengan perkataan lain, suhu dinamik penyebarannya kian meninggi pula. Istilah ‘rahasia umum’ tampak menunjuk

kepada hal-hal seperti itu. Yang paling mungkin hanyalah dimensi waktu, soal cepat-lambat dalam difusinya dan kemungkinan sarat distorsi yang akibatnya malah lebih merugikan perkembangan subsistem dan atau keseluruhan sistem bersangkutan.

Kontrol informasi di dalam kerangka sistem sebenarnya bukan masalah karena memang mutlak diperlukan. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana kontrol itu dilakukan, di dalam proses mana itu terjadi, dan apa akibat-akibatnya bagi keseluruhan sistem maupun bagi subsistem-subsistem yang interdependent. Media massa sebagai salah satu bagian dari bagian-bagian saling-bergantung dari keseluruhan sistem sosial, memberikan kontrolnya dan sebaliknya juga dikontrol oleh lain-lain subsistem. Hal ini menunjukkan bahwa media massa juga harus mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam sistem di mana ia menjadi bagian dari padanya. Kebebasan yang dimiliki oleh media di dalam bekerja dibatasi oleh kebebasan subsistem-subsistem yang lain. Batas-batas kebebasan masing-masing di antara komponen-komponen sistem harus saling dijaga dan ditaati, karena pelanggaran atas batas kebebasan ini akan menimbulkan disharmoni yang akan merusak keseimbangan sistem.

Jadi kontrol informasi di dalam kepentingan pemeliharaan sistem mengambil banyak bentuk dan bukan hanya monopoli dari salah satu komponen atau subsistem saja, misalnya media massa saja atau hanya pemerintah saja. Sorotan sejumlah komponen masyarakat terhadap penggunaan kebebasan media massa yang dianggap “kelewatan” sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini adalah salah satu contoh konkrit dari perwujudan kontrol yang diberikan oleh subsistem-subsistem yang lain. Di sini terjadi proses saling-kontrol di kalangan dan di antara komponen-komponen sistem itu. Berbagai-bagai bentuk kontrol dari sistem tersebut terjadi di dalam komunikasi massa. Namun tidak bisa dianggap bahwa hanya kontrol sosial itu satu-satunya fungsi yang dilakukan oleh

komunikasi ini. Sebab hakekatnya semua proses komunikasi mempunyai fungsi kontrol baik bersifat latent maupun manifest.

Bagi media massa sendiri, di dalam fungsi pemeliharaan sistem sedikitnya melakukan dua jenis kontrol informasi yang pelaksanaannya bisa bertumpang-tindih, yakni *kontrol feedback* dan *kontrol distribusi* (Donohue et al., 1973). Dalam kontrol feedback, media massa memberikan feedback atau pengaturan kepada lain-lain subsistem dan atau kepada keseluruhan sistem. Ia berfungsi sebagai regulator, sebagai *early warner system*, atau sebagai korektor terhadap penyimpangan-penyimpangan norma sosial yang dominan. Ia melancarkan tekanan-tekanan korektif kepada subsistem-subsistem yang mungkin keluar dari keseimbangan fungsional dalam hubungannya dengan lain-lain subsistem. Di dalam perspektif ini, maka pengungkapan skandal, korupsi, kolusi dan lain-lain perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau yang melecehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, oleh media massa dilakukan dalam fungsi pemeliharaan sistem itu. Pengungkapan korupsi, skandal dan sebagainya itu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegemaran media massa kepada sensasi untuk kepentingan sensasi. Tetapi, sebagaimana Lippmann (1961) mengamatinya, pengungkapan hal-hal seperti itu berarti mentrapkan norma-norma sosial yang dominan kepada pihak-pihak, lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok sosial yang baru, atau yang menyeleweng, atau yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur sosial bersangkutan. Sama dengan itu, fungsi-fungsi “pengawasan lingkungan” dan “korelasi” dari Lasswell (1948) atau fungsi “pengawal” dari Schramm (1964).

Dalam kontrol distribusi, yang dapat terjadi secara sendiri maupun secara bersamaan dengan kontrol feedback, media massa melakukan fungsi pemeliharaan sistem melalui diseminasi selektif dan berbagai ragam teknik-teknik penyebaran maupun penyaringan informasi. Dalam situasi bangsa seperti

sekarang ini yang tengah dilanda krisis yang cukup mencemaskan, media massa sebagai salah satu komponen yang penting tentunya diharapkan untuk selalu mendahulukan kepentingan nasional dari semua kepentingan yang lain. Dari padanya dituntut kearifan yang ekstra hati-hati di dalam menentukan apa yang boleh disiarkan dan apa yang tidak. Walaupun sesuatu yang diketahuinya mempunyai nilai berita yang tinggi atau dalam kriteria jurnalistik merupakan “big news” dan sangat menguntungkan dari segi bisnis kalau hal itu diperkirakan hanya akan mengundang perpecahan atau menambah runyam situasi kemelut dalam masyarakat, informasi tersebut tidak dipublikir alias di-suppress.

Dengan perkataan lain, bahaya disintegrasi yang kini mengancam keutuhan bangsa, pelaksanaan tanggung jawab sosial media massa dalam bekerja sungguh-sungguh diperlukan. Saatnya kini kebebasan yang dimilikinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang kita semua rasakan mengalami kelunturan. Pentingnya penanaman kembali nilai-nilai ini bersifat imperatif karena berfungsi sebagai alat perekat persatuan dan kesatuan nasional dan peredam konflik-konflik kepentingan yang dapat merusak norma-norma relasional dan regulatif dalam struktur sosial masyarakat bangsa.

Loyalitas anggota-anggota masyarakat kita kepada satu dengan yang lain dan kepada keseluruhan sebagai suatu sistem kita rasakan kemundurannya. Menghadapi masalah besar ini media massa dapat memberikan sumbangsuhnya yang sangat besar pula kepada negaranya dengan membangkitkan terus jiwa dan semangat solidaritas nasional dan moril bangsa dalam masyarakat yang sementara ini mengalami keterpurukan melalui berbagai ragam tehnik penyebaran yang dipunyainya. Hanya dengan cara itu media massa dapat menjawab dengan sebaik-baiknya tantangan disintegrasi yang menghantui kita sebagai suatu bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Brouwe, Marten, 1967. *Prolegomena to a Theory of Mass Communication*.
- , 1968. *Stereotypen als Folklore*. Vinkeveen: Uitgeverij Fringila.
- Donohue, G. A. et al., 1973. *Mass Media Functions, Knowledge and Social Control*. *Journalism Quarterly*, 50: 652-59.
- Evers, W.J.M., 1999. *Informele Openbaar making*. Nijmegen: Proefschrift.
- Lasswell, H.D., 1948. *The Structure and Function of Communication in Society*; in Lyman Bryson (ed). *The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Lazarsfeld, Paul F. and Merton, Robert K., 1948. *Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action*; in Lyman Bryson (ed). *The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Lerg, Winfried B., 1970. *Das Gespräch*. Dusseldorf: Bartelsmann Universitätsverlag.
- Lin, Nan. 1973. *The Study of Human Communication*. Indianapolis: Bobbs – Merrill.
- Lippmann, Walter, 1961. *Drift and Mastery*.
- McQuail Denis. 1992. *Media Performance*. London: Sage Publication.
- Schramm, Wilbur. 1964. *Mass Media and National Development : The Role of Information in Developing Countries*. California : Stanford University Press.
- Shibutani, Tamotsu. 1966. *Improvised News*. Indianapolis: Bobbs – Merrill.
- Stappers, J.G. 1983. *Masscommunicatie*. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers.